



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.78, 2010

Kementerian Pertanian. Identifikasi. Ternak
Ruminansia Besar. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 16/Permentan/OT.140/1/2010

TENTANG

**PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK
RUMINANSIA BESAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh akurasi data untuk mendukung pembangunan peternakan dan pelayanan veteriner nasional perlu dilakukan identifikasi dan pengawasan terhadap lalulintas ternak ruminansia besar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, daya guna serta hasil guna dalam identifikasi dan pengawasan lalulintas ternak ruminansia besar perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*

- (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT. 140/2/2007;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR.**

Pasal 1

Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar sebagaimana di maksud pada Pasal 1 merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 16/Permentan/OT.140/1/2010

TANGGAL : 29 Januari 2010

PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN

TERNAK RUMINANSIA BESAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak merupakan makhluk hidup yang diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup manusia. Untuk itu maka budidaya ternak yang tersebar di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan produksi dan produktivitasnya serta terus dikembangkan agar dapat bermanfaat nyata bagi peternak dan masyarakat.

Ternak ruminansia besar sebagai sumber produksi daging yang potensial, sudah menjadi komoditi bisnis antar daerah bahkan antar negara sesuai dengan persyaratan teknis keamanan pangan, oleh karena tingginya kebutuhan daging oleh masyarakat.

Untuk menjamin daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), diperlukan sistem yang memiliki kemampuan telusur terhadap penyakit hewan termasuk *zoonosis* dan keamanan pangan mulai dari budidaya ternak hingga rumah potong hewan.

Pada tataran global, sistem identifikasi ternak ruminansia besar telah dipersyaratkan oleh *Office International des Epizooties* (OIE) dalam perdagangan bebas sebagai suatu persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).

Sistem identifikasi merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung kegiatan *surveillance*, sistem peringatan dini dan pelaporan, manajemen wabah penyakit, program vaksinasi, penggunaan obat, pakan dan pestisida secara benar, pengelolaan kelompok ternak atau peternakan, pengawasan mutasi ternak, zoning/kompartemen, inspeksi - sertifikasi ternak dan produk ternak, insiden keamanan pangan serta praktek-praktek perdagangan yang jujur.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman identifikasi ternak ruminansia besar sebagai acuan bagi petugas di lapangan maupun para pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman ini sebagai pedoman bagi:

- a. petugas yang berada di unit pelayanan kesehatan hewan, unit pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan kelompok ternak;
- b. pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam pengembangan usaha bidang peternakan.

2. Tujuan Pedoman ini untuk:

- a. mengefektifkan penelusuran (*traceability*) dalam hal keamanan pangan (*food safety*) baik aspek *zoonosis*, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal;
- b. mengefektifkan pelaksanaan surveilans penyakit hewan menular dan *zoonosis*, serta pelayanan teknis bidang peternakan;
- c. mengefektifkan pendataan populasi ternak melalui pengawasan dan penertiban mutasi ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular antar daerah;
- d. mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
- e. mengefektifkan peningkatan mutu bibit/genetik (pencegahan *inbreeding*) pada ternak potong;
- f. meningkatkan pengembangan usaha budidaya ternak potong dan pencatatan kinerja teknis.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi metode identifikasi; pelaksanaan identifikasi; pencatatan pelayanan dan mutasi peternak; tugas dan wewenang; pengawasan, pelaporan dan pembiayaan.

D. Pengertian

1. Ternak Ruminansia Besar yang selanjutnya disebut ternak adalah ternak sapi potong, ternak kerbau dan ternak sapi perah baik jantan maupun betina dari seluruh struktur umur anak, muda dan dewasa.
2. Identifikasi ternak adalah kombinasi antara identitas dan registrasi ternak secara individu dengan menggunakan tanda spesifik/khusus.
3. Sistem identifikasi ternak adalah mekanisme hubungan komponen identitas yang meliputi identifikasi ternak dan identifikasi peternak atau unit usaha dan mutasi ternak.
4. Mampu telusur ternak adalah kemampuan untuk menelusuri asal usul ternak atau kelompok ternak sepanjang tahapan, kehidupan ternak dimulai dari kelahiran, mutasi, perkawinan, kematian, sampai dengan pemotongan.
5. *Office International des Epizooties* (OIE) adalah badan kesehatan hewan dunia yang bertugas memberikan saran ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan persyaratan kesehatan hewan, perdagangan hewan dan produk hewan kepada negara yang memerlukan.
6. *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) adalah kebijakan yang dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman.
7. Mutasi adalah perpindahan, penambahan dan pengurangan hewan/ternak.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol ketertiban mutasi ternak yang berpeluang sebagai penyebar penyakit hewan menular.
9. Pos Pemeriksaan Ternak (PPT/*check point*) adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ternak dan produk ternak yang dilalulintaskan antar wilayah.
10. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendiagnosa penyakit hewan secara laboratorik.
11. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
12. Penyakit Hewan Menular (PHM) Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian yang tinggi.

13. Kartu Ternak adalah kartu yang menunjukkan identitas ternak.
14. Kartu Peternak adalah kartu yang menunjukkan identitas peternak dan kepemilikan ternak.
15. Status reproduksi ternak adalah kondisi kesehatan organ reproduksi ternak.
16. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) adalah surat yang menerangkan tentang kesehatan hewan.
17. Petugas Pelaksana Identifikasi Ternak (PPIT) adalah petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan identitas ternak pada kartu ternak serta identitas peternak pada kartu peternak serta pencatatan pada buku induk ternak dan/atau memasukkan *database* ternak.
18. Unit Pelaksana Identifikasi Ternak (UPIT) adalah unit kerja yang bertugas melakukan identifikasi ternak dengan wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

BAB II

METODE IDENTIFIKASI

Identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan masalah penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh, dengan metode sebagai berikut:

A. Identitas ternak diberikan dalam bentuk:

1. *Ear Tag* atau *Microchip*; dan/atau
2. Kartu Ternak dan Kartu Peternak.

Identitas ternak merupakan data individu ternak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain. Identitas ternak dalam sistem identifikasi tidak boleh hilang atau diganti atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh petugas.

Identitas ternak paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

1. Identitas umum ternak meliputi:

- a. nomor identitas ternak;
- b. jenis ternak;
- c. bangsa ternak;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. ciri khas (alami, penandaan buatan);
- h. pemilik awal ternak.

2. Status kesehatan hewan meliputi:

- a. catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis *antara lain: Antraks, Septicamie Epizootica, Brucellosis, Surra;*
- b. pengujian (*Milk Ring Test, Rose Bengal Test*, dll);
- c. tindakan pengobatan (antibiotika, *roborantia, supplement, anthelmintika*, dll).

3. Status reproduksi ternak meliputi:

- a. penanganan gangguan reproduksi;
- b. tindakan IB atau kawin alam;
- c. tindakan pengobatan (hormonal);
- d. jumlah kelahiran.

B. Pencatatan Identitas Peternak

Identitas peternak paling kurang memuat informasi ternak sebagai berikut:

1. Data peternak:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. umur;
- d. alamat.

2. Data kepemilikan ternak meliputi:
 - a. nomor identitas ternak;
 - b. jenis kelamin dan umur;
 - c. jumlah ternak (dalam ekor);
 - d. keterangan mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan, pembelian, hibah, hilang dan pemotongan ternak.

BAB III

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI

- A. Kartu Ternak dan Kartu Peternak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota (form kartu ternak dan kartu peternak terlampir).
- B. Kartu Ternak harus disertakan pada kegiatan mutasi ternak baik sebagai ternak bibit, ternak potong dan/atau ternak bakalan dan diserahkan ke pemilik baru atau ke rumah potong hewan bila ternak dipotong.
- C. Kartu Ternak harus disertakan pada setiap ternak yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi/IB.
- D. Kartu Ternak harus disertakan pada saat pemeriksaan di pasar hewan, *check point*, karantina dan rumah pemotongan hewan.
- E. Khusus untuk lalu lintas ternak antar pulau harus menggunakan *ear tag*.
- F. Kartu Ternak dan Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT).

BAB IV

PENCATATAN PELAYANAN DAN MUTASI TERNAK

- A. Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayanan teknis meliputi:
 1. Pelayanan Teknis

Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:

 - a. Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. Pelayanan Reproduksi;
 - c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.

2. Mutasi Ternak

Data mutasi ternak meliputi:

- a. perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
- b. kelahiran;
- c. potong paksa;
- d. hilang;
- e. kematian ternak.

B. Pada kasus kematian dan kehilangan ternak, peternak wajib melaporkan kepada petugas Puskesmas atau petugas lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 12 jam setelah kejadian.

Petugas teknis lapang yang ditunjuk harus segera melakukan:

1. membuat visum kematian ternak untuk yang mati;
2. melakukan pemeriksaan kejadian ternak yang hilang/potong paksa;
3. membuat Berita Acara Ternak Hilang/potong paksa.

C. Setiap jual-beli ternak harus disertai surat keterangan jual-beli ternak yang dibuat oleh petugas teknis yang ditunjuk. Apabila penjualan/pembelian ternak tersebut dilakukan di pasar hewan maka Surat Keterangan Jual Beli Ternak dibuat oleh Kepala Unit Pasar tersebut.

D. Kepada peternak yang memiliki 1 (satu) ekor ternak, apabila terjadi kematian/ potong paksa/hilang/dijual, petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan pada buku registrasi serta menarik kartu ternak dan kartu peternak.

E. Kepada peternak yang memiliki lebih dari 1 (satu) ekor ternak apabila terjadi kematian/potong paksa/hilang/dijual, petugas yang ditunjuk melakukan:

1. memberikan catatan mati/paksa/hilang/jual pada kartu kepemilikan dan buku registrasi;
2. petugas teknis lapang yang ditunjuk menarik kartu ternak terhadap ternak yang mati/potong paksa/hilang/jual;
3. petugas teknis lapang yang ditunjuk melaporkan kejadian ternak mati/potong paksa/hilang/jual/mati, dan menyerahkan kartu ternak kepada petugas dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan selanjutnya petugas dinas Kabupaten/kota mencatat pada data base tingkat kabupaten.

- F. Apabila terjadi kelahiran ternak maka peternak melaporkan kepada petugas teknis lapang dan petugas tersebut mencatat pada kartu peternak dan buku registrasi serta bagi ternak yang baru lahir dibuatkan kartu ternak baru.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar dilakukan secara berjenjang.

A. Tugas:

1. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. melaksanakan kegiatan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
- b. mengevaluasi data hasil identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
- c. menerapkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat kabupaten/kota;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi ke tingkat provinsi.

2. Tingkat Provinsi

- a. mengkoordinasikan kegiatan identifikasi ternak ruminansia besar dengan instansi terkait di tingkat provinsi;
- b. membina dan memantau pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat provinsi;
- c. mengevaluasi data hasil identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat provinsi;
- d. menerapkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat nasional;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ke tingkat pusat.

3. Tingkat Pusat

- a. mengkoordinasikan kegiatan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar dengan instansi terkait;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar;

- c. memantau pelaksanaan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar di tingkat nasional;
 - d. mengevaluasi data hasil identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar di tingkat nasional;
 - e. mengembangkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat nasional, yang meliputi data base, kelembagaan, sumberdaya manusia dan fasilitas pendukungnya;
 - f. menetapkan nomor kode identifikasi ternak ruminansia besar berdasarkan kode wilayah Badan Pusat Statistik.
4. Asosiasi yang bergerak di bidang peternakan harus berperan aktif dalam penerapan identifikasi ternak ruminansia besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Wewenang

Wewenang yang diberikan dalam melaksanakan tugas identifikasi ternak ruminansia besar adalah:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai kewenangan dalam Penetapan Pedoman Identifikasi Ternak Ruminansia Besar yang dapat dilaksanakan baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pembinaan pelaksanaan Pedoman Identifikasi Ternak Ruminansia Besar di lintas kabupaten/kota.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam:

- a. pelaksanaan identifikasi peternak dan ternak;
- b. pengawasan lalu lintas atau pengeluaran dan pemasukan ternak ruminansia besar diwilayahnya;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada peternak, petugas di tingkat desa dan kecamatan;

- d. melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia besar di wilayahnya.

BAB VI PENGAWASAN

- A. Pelaksanaan pengawasan identifikasi ternak ruminansia besar pada wilayah budidaya, pasar hewan dan rumah pemotongan hewan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- B. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar kabupaten dilakukan di pos pemeriksaan ternak atau PPT (*check point*) oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- C. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar provinsi dilakukan di PPT oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi.
- D. Petugas pengawas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.

BAB VII PELAPORAN

A. Mekanisme Pelaporan

Laporan identifikasi ternak ruminansia besar (form laporan terlampir) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat Pusat, dengan mekanisme laporan sebagai berikut:

1. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kecamatan (KCD) menyampaikan laporan identifikasi ternak ruminansia besar secara berkala setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
2. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan identifikasi ternak ruminansia besar di wilayahnya kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan Bupati/Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi menyampaikan laporan identifikasi ternak ruminansia besar di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. Pengelolaan Data

1. *Data base* tingkat Kabupaten/Kota

Data base tingkat Kabupaten/Kota mencakup data identitas peternak dan ternak sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Identifikasi sesuai dengan format dan pengkodean yang telah ditetapkan. Data berasal dari laporan tingkat kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

2. *Data base* tingkat Provinsi

Data base tingkat Provinsi mencakup data yang telah diolah di tingkat kabupaten/kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan, meliputi rekapitulasi data struktur populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, kehilangan, kelahiran dan kematian ternak.

3. *Data base* tingkat Pusat

Data base tingkat Pusat mencakup data yang telah diolah di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia meliputi: rekapitulasi data struktur populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, kelahiran dan kematian ternak.

C. Pelaporan Data Elektronik

Selain pelaporan berkala, identifikasi ternak secara bertahap akan dikembangkan dengan cara elektronik yang meliputi data: struktur populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, kelahiran dan kematian ternak.

Penyajian database identifikasi ternak dioperasionalkan secara *on-line* sehingga dapat diakses setiap saat, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

- A. Untuk peternak kecil biaya pengadaan kartu ternak/*ear tag/microchip*, kartu peternak dibebankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- B. Peternak komersial (di atas 21 ekor) bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengadaan kartu ternak/*ear tag/microchip*.

- C. Biaya yang ditimbulkan untuk supervisi, monitoring kegiatan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar dibebankan kepada anggaran pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- D. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengadaan perangkat keras dan lunak untuk mengembangkan jejaring informasi ternak ruminansia besar skala nasional.

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

FORM 1

LOGO
KAB

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN

.....
Jl.....

KARTU TERNAK

1. Nomor :
2. Kode Ternak : .
3. Ras/Bangsa :
4. Jenis Kelamin:
5. Tanggal Lahir/Umur : tgl...../.bln/Th..... / tahun
6. Tanda Khusus:
7. Status Kelahiran : 1. 2. 3. 4.
8. Nama Pemilik :
9. Alamat :
10. Nama Pemilik I :
11. Catatan Kesehatan Hewan :

No	Kegiatan	Jenis Obat/vaksin/uji	Tgl/Bln/Th	Keterangan
1.	Pengobatan			
2	Vaksinasi			
3	Pengujian			

12. Catatan Status Reproduksi Ternak :

No	Kegiatan	Uraian	Tgl/Bln/Th	Keterangan
1.	IB/Kawin Alam			
2	Penanganan Reproduksi			
3	Waktu melahirkan			

Keterangan : Kode sapi 02
Kode Kerbau 03

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(.....)



DINAS PETERNAKAN KABUPATEN

.....
Jl.....

KARTU PETERNAK

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tgl Lahir /Umur : tgi/bln...../thn...../ tahun
4. Alamat :
5. Jumlah Ternak : Sapiekor, Kerbau ekor
6. Data Kepemilikan dan Mutasi Ternak :

No.	Juml ternak awal/ Kode Ternak	Mutasi							Jumlah	Ket
		Lahir	Mati	Jual	Beli	Potong	Hilang	Hibah		
	Total									

Pemilik
Kabupaten/Kota

(.....)

Kepala Dinas

(.....)

LAPORAN BULANAN JUMLAH TERNAK (SAPI/KERBAU) BERDASARKAN STATUS TERNAK

Bulan/Tahun :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Nama Desa	Jenis Ternak (ek)		Status Ternak (ek)		Status Kepemilikan				Tujuan Pemeliharaan								Keterangan							
		Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi Perorangan	Kerbau Perorangan	Sapi B. Usaha	Kerbau B. Usaha	Sapi Perorangan	Kerbau Perorangan	Sapi B. Usaha	Kerbau B. Usaha	Sapi Perorangan	Kerbau Perorangan	Sapi B. Usaha	Kerbau B. Usaha								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
		Jumlah																							

.....

KCD

(Nama Terang)

LAPORAN TRIWULAN JUMLAH TERNAK (SAPI/KERBAU) BERDASARKAN STATUS TERNAK

Triwulan I/III/III/Tahun :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No.	Kecamatan	Jenis Ternak (ek)		Status Ternak (ek)				Status Kepemilikan				Tujuan Pemeliharaan										Keterangan		
		Sapi	Kerbau	Sapi		Kerbau		Sapi Perorangan		Sapi B.Usaha		Kerbau Perorangan		Kerbau Perorangan		Kerbau B.Usaha		Kerbau B.Usaha						
				ex.impor	lokal	ex.impor	lokal	Perorangan	B.Usaha	Perorangan	B.Usaha	Bibit	Potong	Bakalan	Potong	Bakalan	Potong	Bibit	Potong	Bakalan	Potong			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Jumlah																								

.....

Kepala Dinas Kab/Kota Yg Membidangi Fungsi Peternakan & Kewan
(Nama Terang)

Tembusan : Bupati/Walikota

LAPORAN SEMESTER JUMLAH TERNAK (SAPI/KERBAU) BERDASARKAN STATUS TERNAK

Semester I/II/Tahun :
Provinsi :

No.	Kabupatè Kota	Jenis Ternak (ek)		Status Ternak (ek)				Status Kepemilikan				Tujuan Pemeliharaan										Keterangan				
		Sapi	Kerbau	Sapi ex. impor	Sapi lokal	Kerbau ex. impor	Kerbau lokal	Sapi (ek) Perorangan	Kerbau (ek) Perorangan	B. Usaha (10)	B. Usaha (11)	Sapi Perorangan (ek)			Kerbau Perorangan (ek)			Sapi B. Usaha (ek)			Kerbau B. Usaha (ek)					
												Bibit	Potong	Bakalan	Bibit	Potong	Bakalan	Bibit	Potong	Bakalan	Bibit		Potong	Bakalan	Bibit	Potong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Jumlah																										

Tembusan : Gubernur

.....
Kepala Dinas Provinsi Yg Membidangi Fungsi Peternakan & Kewan
(Nama Terang)

LAPORAN BULANAN MUTASI TERNAK (SAPIKERBAU)

Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jumlah awal bulan		Jumlah Terlahir (sapi)		Jumlah Terlahir (kerbau)		Jumlah Terlahir (sapi)		Jumlah Terlahir (kerbau)		Jumlah wafat balak (sapi)		Jumlah wafat balak (kerbau)		Keterangan
	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	
1.	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	
2.	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	2	
Jumlah	20	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	4	

Keterangan :
 J = Jantan
 B = Betina
 $10 = 10 + 0 + 10 + 0 = 20$
 $2 = 0 + 2 + 0 + 2 = 4$
 $20 = 10 + 0 + 10 + 0 = 20$
 $4 = 0 + 2 + 0 + 2 = 4$

401
 (Ratna Dimping)

LAPORAN TRIWULAN MUTASI TERNAK (SAPIKORBAU)

Triwulan Tahun : 01/Januari s.d. 01/...
Kabupaten :
Provinsi :

No.	Kecamatan	Sapi		Kerbau		Ternak Lain - CEU		Kerbau		Sapi		Portapak		Sapi		Kerbau		Sapi		Kerbau		Sapi		Kerbau		Sapi		Kerbau			
		J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B
		Jumlah awal		jumlah lahir		jumlah mati		jumlah pindah		jumlah masuk		jumlah keluar		jumlah pindah		jumlah masuk		jumlah keluar		jumlah pindah		jumlah masuk		jumlah keluar		jumlah pindah		jumlah masuk		jumlah keluar	
01
Jumlah		

Instansi : Balai Mutasi Ternak
Kepala Dinas : Kepala Mutasi Ternak
Kantor : ...

LAMPIRAN BULANAN PENYONTOHAN TERNAK (SAPI/KERBAU)

Diketahui :
 di Surabaya, 12 Desember 2009
 Kepala Kantor :

No. dan Tanggal Pemeriksaan	Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan		Jumlah ternak terdapat pada pemeriksaan	
	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau	Sapi	Kerbau
1	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
2	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
3	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
4	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
6	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
7	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
8	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
9	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
10	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5

650

ditandatangani :
 Kepala Kantor :
 Kepala Kantor :
 Kepala Kantor :

LAPORAN SEMESTER PEMOTONGAN TERNAK (SAP/HERBAL)

Sebagai lampiran:
 Formasi

No	Jenis Ternak	Kategori	Jumlah Ternak		Kategori	No. of Ternak	Parturition		No. of Parturition	Kategori	No. of Parturition	Kategori	No. of Parturition	Kategori	No. of Parturition
			Sap/Herbal	Kategori			Sap/Herbal	Kategori							
1	BK	BK													
2	BK	BK													
3	BK	BK													
4	BK	BK													
5	BK	BK													
6	BK	BK													
7	BK	BK													
8	BK	BK													
9	BK	BK													
10	BK	BK													
11	BK	BK													
12	BK	BK													
13	BK	BK													
14	BK	BK													
15	BK	BK													

Sebagai lampiran:
 Formasi

Formasi

LAPORAN BEMESTER JUALAH TELINAK (SAMPULERBAU) BERDASARKAN STATUS PENYAKIT TERNAK

Semarang, tahun : 2011
Kabupaten : 051015

No. dan tahun KUB	Jumlah Terjual		Mentah Terjual		Auk	Daging Perok (Cah)		Polioyone Kowon (Ud)		Kandungan Empeyok (Ud)	
	S	K	S	K		SE	ER	U	K	P	K
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah											

Kantor Dinas Perikanan, Maritim dan Kelautan Kabupaten Sragen

Tembahan 5.610/10

No. 10/2011

LAPORAN DULANAN JUNILAH TERNAK (SAPI MERBAU) BERDASARKAN STATUS PENYAKIT TERNAK

Berdasarkan
kesimpulan :
sebelum ini :

No	Uraian Data	Jumlah Ternak (Sapi)			Edukasi Ternak (Edukasi)			Diyakini Penyakit (Diyakini)			Pemeriksaan (Pemeriksaan)			Pemeriksaan Kandang (Pemeriksaan)		
		Salah	Sesuai	Seluruh	Salah	Sesuai	Seluruh	Salah	Sesuai	Seluruh	Salah	Sesuai	Seluruh	Salah	Sesuai	Seluruh
1.	Jumlah ternak (Sapi)	1	1	1												
2.	Salah															
3.	Sesuai															
4.	Seluruh															

Fungsionalitas dan OS (No. P.03504000101)
Nama Ternak:

JADWAL TRIVULSI JUALAH TERNAK (SAPIKERUANG) BERDASARKAN STATUS PENYAKIT TERNAK

Triwulan Tahun : ...
 Subkota : ...
 Kecamatan : ...

No. Register	Jumlah Ternak Terak		Menderita Ternak Terak	Membunuh Ternak Terak	Dokter Peternak	Sembuh	Dokter Peternak	Sembuh	Dokter Peternak	Sembuh	Dokter Peternak	Sembuh	Dokter Peternak	Sembuh	Penyakit yang Didapat	
	Sapi	Sapi												
Jumlah																

Tanggal : ...

Kantor : ...

...